

KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV.SULUT

Nama : Delly Taidi

Nim : 090811015

Dosen Pembimbing : 1.Dr.Dra.Joyce J Rares, M.si

2.Drs.Joorie M. Ruru, M.si

***Abstrak :** Environment Agency North Sulawesi governor is the element job aid in carrying out duties and functions of guidance , coordination and technical services in environmental management . To carry out the duties and functions set out policies / programs and activities undertaken . Issues to be addressed in this study is how the performance of the organization Environmental Agency of North Sulawesi in implementing the policy / program / activity has been established .*

This study uses qualitative methods . In this study , the performance is defined as the level of success or achievement of the implementation of the policy / program / activity has been established in the strategic planning of the organization . Level of performance or the success seen through five indicators , namely : effectiveness , efficiency , responsiveness , transparency , and accountability .

Results showed : (1) the level of effectiveness achieved is well seen from the implementation of the program / activity has been established , and the level of realization or achievement of planned output targets , (2) the level of efficiency is better seen from the use of budget / funding and human resources ; (3) the level of responsiveness is better seen from the alignment of programs and activities adopted / implemented with environmental issues and the needs / interests of the community , (4) the level of transparency is seen both ease of access to the necessary information society , as well as the openness and clarity of information available or given , and (5) the level of accountability is a good views of accountability to the public or stakeholder institutions on the performance of the policy / program / activities undertaken or accomplished .

Based on the results of these studies conclude that the performance of the Provincial Environmental Agency in carrying out its duties and functions related to the development , coordination and technical services in environmental management , showing good results . Conclusions based on these results it is suggested that , with the increasing environmental problems in North Sulawesi it should be anticipated by BLH with established programs / activities more and more effective . In this regard the budget / funding allocated to North Sulawesi BLH needs to be improved / added .

Keywords : organizational performance , policies / programs / activities of environmental management ..

PENDAHULUAN

Peranan birokrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah sangat penting

dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu

upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi terus dilakukan seiring dengan reformasi di bidang-bidang lainnya. Reformasi birokrasi yang telah dan terus dilakukan sekarang ini meliputi baik aspek organisasi maupun aspek manajemen pemerintahan. Reformasi birokrasi pada aspek organisasi adalah penataan kembali organisasi dari birokrasi itu sendiri; sedangkan reformasi pada aspek manajemen pemerintahan dilakukan dengan penyempurnaan pengelolaan sumber daya aparatur birokrasi (meliputi : sistem rekrutment, sistem pendidikan dan pelatihan, sistem karier, sistem penggajian, sistem penilaian kinerja), penyempurnaan pengelolaan keuangan (meliputi : sistem penganggaran, sistem pertanggung jawaban keuangan), penyempurnaan pengelolaan sarana dan prasarana (sistem pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan); dan penyempurnaan prosedur kerja (hubungan kerja, koordinasi).

Masih adanya permasalahan umum kinerja birokrasi tersebut terus mendorong birokrasi pemerintah, termasuk birokrasi pemerintah daerah, untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kinerja. Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara

merupakan salah satu perangkat daerah Propinsi Sulawesi Utara yang terus memacu kinerja untuk dapat mencapai kinerja optimal. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008, dan kemudian dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2008, bahwa Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Gubernur melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup, antara lain meliputi : penyelenggaraan urusan dibidang tata lingkungan, penyelenggaraan urusan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, penyelenggaraan urusan dibidang konservasi sumberdaya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan, dan penyelenggaraan urusan dibidang penataan lingkungan hidup.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, BLH Propinsi Sulawesi Utara dalam Perencanaan Strategik-nya 2010-2015 telah menetapkan tujuan kebijakan/program/kegiatan prioritas yaitu : (1) pemeliharaan dan pengembangan potensi alam daerah

untuk menjadi warisan dunia, (2) peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, (3) peningkatan pemahaman masyarakat tentang adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim secara intensif, (4) pemantapan peran pelaku bisnis dalam perekonomian, (5) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut serta air tanah, (6) perlindungan kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan, dan (7) peningkatan kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. Sedangkan sasaran kebijakan/program/kegiatan prioritas adalah : (1) terwujudnya pelestarian kawasan konservasi (taman nasional, cagar alam, taman wisata alam), (2) terlaksananya program pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, (3) terwujudnya Kawasan ekonomi Khusus, (4) terlaksananya peningkatan kualitas pengelolaan SDA, (5) terwujudnya kerjasama internasional terkait perubahan iklim, (6) terpantaunya DAS, (7) terkendalinya lahan kritis, kepunahan kekayaan hayati, dan alih fungsi hutan serta kebakaran hutan, (8) terpantaunya ekosistem teluk tomini,

teluk manado, pulau-pulau kecil dan terluar.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, dan jenis data (Sugiono, 2009). Sesuai dengan tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui/mengukur kinerja Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara, maka penelitian ini lebih memungkinkan apabila tingkat eksplanasi menggunakan metode kualitatif.

Menurut Arikunto (2000) bahwa penelitian kualitatif umumnya adalah penelitian nonhipotesis, sehingga dalam proses penelitiannya tidak perlu mengajukan atau menguji hipotesis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengembangkan konsep, menghimpun data dan fakta serta menganalisis dan menginterpretasi data, tetapi tidak melakukan pengujian suatu hipotesis.

B. Definisi Konsepsional Fokus Penelitian

Cara pengukuran variabel penelitian biasanya dirumuskan dalam apa yang disebut definisi konsepsional dan definisi operasional. Dalam definisi konsepsional, peneliti berusaha

menggambarkan batasan dari variabel yang hendak diteliti.

Konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kinerja badan lingkungan hidup propinsi Sulawesi Utara. Dalam penelitian ini kinerja didefinisikan secara konseptual sebagai tingkat keberhasilan atau pencapaian pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik organisasi. Tingkat keberhasilan tersebut dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator yaitu : efektifitas, efisiensi, responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

C. Sumber Data (Informan)

Salah satu sifat dari penelitian kualitatif ialah tidak terlalu mementingkan jumlah sumber data/informan, tetapi lebih mementingkan *content*, relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa, atau hal.

Adapun sumber data/informan dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan data terakhir jumlah pegawai sebanyak 47 orang PNS. Dari jumlah pegawai tersebut diambil beberapa orang sebagai sumber data/informan dari unsur pejabat struktural yaitu Sekretaris (1 orang),

Kepala Bidang (4 orang), Kepala Sub Bidang (4 orang), dan dari unsur pegawai staf/pelaksana (2 orang), sehingga jumlah keseluruhan informan ada sebanyak 11 orang.

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong (2006) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Oleh karena itu instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*). Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dari responden/informan. Wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dengan menggunakan pedoman yang telah dipersiapkan lebih dahulu (*interview guide*), dan wawancara secara mendalam (*indepth interview*).
2. Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia di lokasi penelitian yakni Badan Lingkungan

Hidup Propinsi Sulawesi Utara, terutama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

3. Observasi. Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena nyata yang berhubungan dengan fokus penelitian ini. Data hasil observasi ini merupakan pendukung data primer hasil wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Dalam hal ini metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif (Miles dan Huberman *dalam* Rohidi dan Mulyarto, 2002). Menurut kedua penulis ini bahwa model analisis interaktif memungkinkan peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada verifikasi atau penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian metodologi penelitian di atas bahwa tujuan penelitian ini ialah

untuk mengetahui kinerja organisasi Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara dalam implementasi kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Kinerja organisasi tersebut didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan atau pencapaian pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik organisasi. Tingkat keberhasilan tersebut dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator seperti efektifitas, efisiensi, responsivitas, transparansi, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut maka dilakukan wawancara terhadap beberapa pejabat struktural dan beberapa pegawai pelaksana di Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara yaitu Sekretaris (1 orang), Kepala Bidang (4 orang), Kepala Sub Bidang (4 orang), dan dari unsur pegawai staf/pelaksana (2 orang). Data/informasi yang diperoleh dari wawancara dianalisis dengan teknik analisis kualitatif model interaktif. Hasil analisis data wawancara dikemukakan berikut ini.

1. Efektivitas

Secara umum efektivitas mengandung pengertian sebagai tingkat tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Barnard

dalam Gibson dkk, 1998). Dengan demikian, konsep efektivitas berhubungan dengan rasio atau perbandingan *outcome* dan *output*; bahwa suatu kebijakan/program atau kegiatan dikatakan efektif apabila mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan/program atau kegiatan tersebut; dengan kata lain pengujian dasar dari efektivitas adalah apakah kebijakan/program atau kegiatan menghasilkan hasil dan dampak yang diharapkan.

Berdasarkan konsep tersebut maka dalam penelitian ini tingkat efektivitas dilihat dari dua aspek yaitu : (1) apakah kebijakan/program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai rencana kebijakan yang ditetapkan sebelumnya, (2) apakah target yang ditetapkan untuk setiap program/kegiatan dapat dicapai.

Hasil wawancara dengan para pejabat terkait yang dikemukakan di atas secara keseluruhan memberikan gambaran tentang kinerja Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara dilihat dari indikator efektivitas, yaitu : (1) Program/kegiatan yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pokok (4 program dan 13 kegiatan) dapat dilaksanakan dengan baik sesuai rencana yang ditetapkan; (2) Sasaran dari

program/kegiatan yang ditetapkan pada umumnya atau hampir seluruhnya dapat dicapai/direalisasikan secara optimal sesuai target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara dilihat dari indikator efektivitas, menunjukkan kategori kinerja yang baik atau berhasil.

2. Efisiensi

Konsep efisiensi menggambarkan rasio *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan; atau dengan kata lain menggambarkan apakah input yang digunakan telah menghasilkan hasil sebanding dengan output program atau kebijakannya. Suatu kebijakan, program atau kegiatan dinyatakan efisien jika suatu target tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya diperbandingkan secara relatif terhadap kinerja usaha sejenis atau antar kurun waktu (Dwiyanto dkk, 2002). Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan, misalnya : perbandingan antara hasil kerja dengan biaya atau dengan waktu atau dengan tenaga yang dipergunakan untuk menghasilkan hasil itu (Gibson dkk, 1998).

Berdasarkan konsep tersebut maka dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan efisiensi adalah rasio atau perbandingan antara hasil yang dicapai oleh suatu program/kegiatan dengan sumber-sumber daya yang digunakan dalam mencapai hasil tersebut. Dalam hal ini efisiensi dilihat dari dua aspek, yaitu : (1) rasio atau perbandingan antara hasil program/kegiatan yang dicapai dengan besar anggaran/dana yang dipergunakan; dan (2) rasio atau perbandingan antara hasil program/kegiatan yang dicapai dengan sumberdaya manusia atau tenaga yang dipergunakan.

Keseluruhan hasil wawancara mengenai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari rasio atau perbandingan antara hasil capaian atau realisasi program/kegiatan dengan penggunaan anggaran dan sumberdaya manusia (pegawai), nampaknya sudah menunjukkan tingkat efisiensi yang baik/tinggi.

3. Responsivitas

Responsivitas bermakna bahwa lembaga-lembaga dan proses-proses harus melayani *stakeholders*. Dalam konteks birokrasi pemerintah, responsivitas

menunjuk pada keselarasan antara program dan kebijakan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena menggambarkan secara langsung kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara program yang ditetapkan dengan kebutuhan masyarakat; hal itu tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi pemerintah dalam mewujudkan misi dan tujuannya (Dwiyanto dkk, 2002). Organisasi publik yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang buruk juga (Osborne dan Plastrik, dalam Dwiyanto dkk, 2002).

Berdasarkan konsep tersebut maka dalam penelitian ini responsivitas didefinisikan sebagai kemampuan BLH Propinsi Sulawesi Utara untuk mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan permasalahan lingkungan hidup di daerah ini serta kebutuhan/kepentingan masyarakat umumnya. Oleh karena itu, tingkat responsivitas dilihat dari tingkat keselarasan antara program dan kegiatan

yang ditetapkan oleh BLH Propinsi Sulawesi Utara dengan permasalahan lingkungan hidup di daerah dan kebutuhan/kepentingan masyarakat umumnya. Berikut ini dikemukakan apa yang dikemukakan oleh Sekretaris BLH Propinsi Sulawesi Utara mengenai aspek responsivitas.

Hal-hal yang terungkap dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BLH Propinsi Sulawesi Utara selama ini telah sesuai atau selaras dengan permasalahan lingkungan hidup yang ada di daerah Sulawesi Utara yang nampaknya semakin meningkat dan perlu penanganan secara efektif

4. Transparansi

Dalam konsep *good governance*, transparansi mempunyai makna bahwa proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diperoleh atau diterima oleh mereka yang membutuhkan; dan bahwa informasi tersebut harus dapat dipahami dan dapat dimonitor (Sedarmayanti, 2003). Menurut Dwiyanto dkk (2002) bahwa transparansi birokrasi merupakan isu yang penting bagi upaya ke arah perbaikan kinerja birokrasi pemerintah. Transparansi dalam birokrasi dapat

memberikan implikasi pada menurunnya tingkat korupsi di dalam birokrasi.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam penelitian ini transparansi didefinisikan sebagai tingkat kebebasan atau kesempatan yang diberikan kepada masyarakat ataupun *stakeholders* lainnya untuk mengakses atau memperoleh informasi yang dibutuhkan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara. Tingkat transparansi dilihat melalui beberapa hal : (a) kemudahan masyarakat memperoleh informasi yang mereka butuhkan; (b) keterbukaan dan kejelasan informasi yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat transparansi BLH Propinsi Sulawesi Utara dalam menyediakan dan memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat atau *stakeholders* lainnya sudah dilakukan dengan baik.

5. Akuntabilitas

Dalam konsep *good governance*, akuntabilitas bermakna bahwa para pembuat keputusan dalam pemerintahan bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders* (Sedarmayanti, 2003). Menurut Dwiyanto dkk (2002) bahwa

akuntabilitas dapat juga menunjuk pada seberapa besar kebijakan, program dan kegiatan organisasi public tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat; karena para pejabat politik tersebut dipilih oleh rakyat sehingga dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Namun menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI) bahwa akuntabilitas tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal organisasi atau kepentingan eksternal organisasi. Lenvile (dalam Yousa, 2002) menyebutkan bahwa akuntabilitas publik dapat dilihat sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik kepada masyarakat. Akuntabilitas publik atau birokrasi pemerintah adalah suatu bentuk pertanggung jawaban birokrasi kepada pejabat politik, kelompok sasaran, pimpinan, kelompok social lainnya dalam masyarakat. Dalam akuntabilitas birokrasi pemerintah, tanggung jawab tidak hanya diberikan kepada pimpinan saja melainkan juga kepada masyarakat luas. Ruang lingkup akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek manajerial,

aspek teknis dan aspek keuangan (Wolf Jr, dalam Yousa, 2002).

Berdasarkan konsep tersebut maka dalam penelitian ini akuntabilitas dilihat dari sejauh mana pertanggung jawaban BLH Propinsi Sulawesi Utara kepada masyarakat luas atau lembaga-lembaga *stakeholders* tentang kinerja kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan atau dicapai baik menyangkut aspek manajerial, aspek teknis maupun aspek keuangan.

Apa yang dikemukakan oleh Sekretaris Dinas dan salah seorang Kepala Bidang tersebut dapat menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara sudah dilakukan dengan baik yaitu melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada masyarakat luas dan lembaga stakeholders terkait.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian tentang kinerja Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, koordinasi dan pelayanan teknis dalam pengelolaan

lingkungan hidup di Propinsi Sulawesi Utara, dilihat dari lima indikator yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa kinerja Badan Lingkungan Hidup Propinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan pembinaan, koordinasi dan pelayanan teknis dalam pengelolaan lingkungan hidup, menunjukkan hasil yang baik.

B. Saran

1. Walaupun kinerja yang dicapai sudah baik, namun dengan makin meningkatnya permasalahan lingkungan hidup di Propinsi Sulawesi Utara maka harus dapat diantisipasi dengan menetapkan program/kegiatan yang lebih banyak dan lebih efektif.
2. Untuk mendorong peningkatan kinerja seiring dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup, maka anggaran/dana yang dialokasikan untuk Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara perlu ditingkatkan/ditambah. Selain itu, sarana dan prasarana kerja juga perlu ditambah sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*, Bina Aksara, Jakarta.
- Armstrong, M. 2004, *Performance Management*, terjemahan, Yogyakarta, Tugu Publisher.
- Bungin, B.M. 2010, *Penelitian Kualitatif*, PT.Kencana, Jakarta.
- Dessler, G., 1996, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, terjemahan, Prenhalindo, Jakarta.
- Dunn William, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, terjemahan, UGM-Press, Yogyakarta.
- Dwiyanto Agus, dkk., 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Echols J. dan Hasan Shadilly, 2002, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gibson, L.J. dan Ivancevich, D. 1998, *Organisasi : Perilaku – Struktur – Proses*, terjemahan, Erlangga, Jakarta.
- Gomes, F.C. 1999, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Handoko, H.T. 2001, *Manajemen Personalia dan Sumberdaya*

- Manusia*, Yogyakarta, BPFE-UGM.
- Keban, Y.T. 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta, Gava Media.
- LAN dan BPKP, 2000, *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Modul Sosialisasi Sistem AKIP, LAN-RI, Jakarta.
- Mahsum, M. 2009, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta, BPFE-UGM.
- Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Redoskarya, Bandung.
- Nasution, 2001, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Rohidi dan Moeljarto, 2002, *Analisis Data Kualitatif*, UI-Press, Jakarta.
- Sembiring, M. 2012, *Budaya dan Kinerja Organisasi*, Bandung, Fokusmedia.
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance*, Bandung, Mandar Maju.
- Sugiono, 2009, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sudarmanto, 2009, *Kinerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wibowo, 2007, *Manajemen Kinerja*, Rajawali Press, Jakarta.
- Yousa Amri, 2002, *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah*, Makalah, STPDN Jatinogor-Jawa Barat.